

Evaluasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Desa Tambaksari, Tirtajaya, Karawang

Eta Sawitri¹, Rahmat Hidayat², Dewi Noor Ajizah³

etasawitri1998@gmail.com¹, rahmat.hidayat@staff.unsika.ac.id²,

dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

This research was based on the UPPKS (Prosperous Family Income Improvement Business) program spearheaded by BKKBN in order to improve welfare and establish a kb program consisting of family stages, especially pre-KS families. The problem started from the number of members of the UPPKS group who joined only slightly compared to the number of people, especially pre-KS in Tambaksari Village, which then raised the question of how the evaluation conducted by the policy implementers. The purpose of this research is to review and analyze the evaluation in the implementation of uppks program tambaksari village district Tirtajaya Karawang regency. The research used qualitative method with case study approach, namely determination of research participants with purposive sampling technique, data collection using observation, interview, documentation, and audio-visual material, as well as data analysis with data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the research seen from inputs, processes, outputs and overall outcomes have not been able to be carried out optimally both in terms of implementing policies related to human resources and budgets, the way of implementation of activities from socialization, coordination and implementation of participation and support is lacking, and the impact felt in the UPPKS program is not significant.

Keywords: Evaluation, UPPKS, Tambaksari Village

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari Program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang dipelopori oleh BKKBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memantapkan program KB yang terdiri dari tahapan keluarga terutama keluarga Pra KS. Permasalahan berawal dari jumlah anggota kelompok UPPKS yang tergabung hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat terutama Pra KS di Desa Tambaksari, yang kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis evaluasi dalam pelaksanaan program UPPKS Desa

Tambaksari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penentuan partisipan penelitian dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio-visual, serta analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilihat dari *input, process, output dan outcomes* keseluruhannya belum dapat terlaksana secara optimal baik dari sisi pelaksana kebijakan yang menyangkut SDM maupun anggaran, cara pelaksanaan kegiatan dari sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan peran serta dukungan yang kurang, serta dampak yang dirasakan dalam program UPPKS tidak signifikan.

Kata Kunci: Evaluasi, UPPKS, Desa Tambaksari

Pendahuluan

Data penduduk miskin di Indonesia Maret 2020 sebesar 26,42 juta dengan penduduk miskin daerah perkotaan 11,16 juta dan daerah pedesaan sebesar 15,26 juta (bps.go.id diakses pada 23 September 2020). Dengan data-data tersebut menegaskan bahwa pemerintah masih harus terus berupaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Salah satunya dengan pembangunan keluarga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang tertuang pada pasal 48 ayat 1 bahwa (d) pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, (f) peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, (g) pengembangan cara inovasi untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan pembangunan keluarga salah satunya dengan program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera dengan peningkatan kualitas kependudukan yaitu melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Perkembangan program tersebut diawali dengan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) pada tahun 1979, kemudian pada tahun 1990-an mengalami pembaharuan dengan nama UUPKS dengan sasaran yang lebih luas yaitu keluarga diantaranya pasangan usia subur (PUS) yang ber KB maupun belum, peserta KB, remaja dan lanjut usia serta sasaran yang lebih utama adalah keluarga dengan indikator pra sejahtera (Pra KS), serta sejahtera I (KS I) turut menjadi perhatian. Tujuan dari adanya program UPPKS untuk memberikan kesempatan kepada keluarga

dengan status pra sejahtera dan sejahtera I untuk meningkatkan ekonomi keluarga sehingga meningkatkan status kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kesertaannya dalam ber KB melalui program UPPKS (BKKBN, 2014).

Program UPPKS yang ada di Kabupaten Karawang berada di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Dimana mempunyai tugas pokok dalam hal pemberian fasilitas, koordinasi pembinaan, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi keluarga.

Jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2019 sebesar 2.323.007 jiwa yang tersebar dalam 30 kecamatan di 309 desa/kelurahan, dengan tahapan Pra KS 112.092 keluarga dan KS I 295.743 keluarga. Terdapat keluarga dengan klasifikasi tahapan Pra KS paling tinggi berada pada Kecamatan Tirtajaya dengan jumlah Pra KS sebanyak 6.782 keluarga dan KS I sebanyak 8.134 keluarga (DPPKB Kabupaten Karawang, 2020).

Pada kecamatan Tirtajaya terdapat 11 (sebelas) desa namun belum semua desa terdapat kelompok UPPKS, pertama kali desa yang terbentuk menjadi kelompok UPPKS yaitu Desa Tambaksari. Desa Tambaksari memiliki 7 dusun dengan 17 RT, terdapat tahapan Pra KS 687 dan KS I 697. Di Desa Tambaksari terdapat 1 (satu) kelompok UPPKS dengan hanya terdapat satu usaha yaitu pengolahan ikan bandeng (Satpel PPKB Kecamatan Tirtajaya, 2020).

Permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan program UPPKS sehingga menjadikan kelompok UPPKS kurang berkembang, seperti halnya terjadi pada kurangnya pengetahuan masyarakat akan kewirausahaan, pengemasan yang kurang menarik, pemasaran produk hanya pada daerah sekitar, minimnya permodalan usaha yang diberikan, serta ketakutan masyarakat untuk memulai usaha, kurang adanya penyaluran informasi kepada kelompok UPPKS lainnya. Pemberian sosialisasi dan informasi yang diberikan oleh DPPKB Kabupaten Karawang belum menyeluruh hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat desa terutama kepada masyarakat Desa Tambaksari. Keikutsertaan Pemerintah dalam pemberian fasilitas akses permodalan kepada pihak lainnya dirasa kurang dan hanya memberikan bantuan berupa ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna).

Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UPPKS merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketahanan ekonomi keluarga. Dengan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bukan hanya bergantung pada

ekonomi kepala keluarga tetapi juga istri dapat membantu perekonomian keluarga terutama keluarga dengan indikator Pra KS dan KS I, sehingga keluarga dapat hidup lebih sejahtera dan diharapkan dapat mempengaruhi sektor lainnya seperti peningkatan pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang lainnya. Kegiatan UPPKS bukan hanya tertuju pada ekonomi produktif tetapi juga diharapkan kesertaan dalam ber KB juga meningkat.

Dari berbagai uraian diatas maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi dalam pelaksanaan program UPPKS yang ada di Desa Tambaksari, Tirtajaya, Karawang? serta muncul tujuan dari penelitian yaitu untuk mengkaji dan menganalisis evaluasi dalam pelaksanaan program UPPKS di Desa Tambaksari, Tirtajaya, Karawang. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu evaluasi program UPPKS Desa Tambaksari, Tirtajaya, Karawang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti berusaha menggali suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat melalui program UPPKS yang ada di Desa Tambaksari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis teknik *purposive sampling*, peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menjadi partisipan di dalam penelitian ini. Terdapat 8 partisipan yang digunakan meliputi Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada DPPKB Kabupaten Karawang, Satpel PPKB Kecamatan Tirtajaya, PLKB Desa Tambaksari, Kepala Desa Tambaksari, Kelompok UPPKS Desa Tambaksari dan Masyarakat Desa Tambaksari. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan empat teknik yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio-visual (Cresswell, 2016:254). Analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2018:247) terbagi dalam tiga bagian yang dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berbagai definisi terkait dengan kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan publik yang didefinisikan oleh Winarno (2011:33) bahwa arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, area studi meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan publik pula secara garis besar

mencakup terakit dengan tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Winarno telah menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahap dari kebijakan publik, oleh sebab itu kemudian dicari definisi dari evaluasi itu sendiri yang mana diperoleh definisi evaluasi dari Subarsono (119:2015) bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Kemudian diperoleh definisi evaluasi kebijakan dari pandangan Jones dalam Agustino (2017:165) yang menunjuk sebuah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menguji kualitas beberapa jenis program pemerintah yang penting, kegiatan tersebut diantaranya melihat dari kondisi obyek program, perencanaan teknik pengukuran dan metode analisis yang digunakan serta format usulan setelah evaluasi dilaksanakan.

Dalam hal pengukuran dari evaluasi kebijakan menurut Bridgman & davis (Tangkilisan, 2003:28) terdapat pada empat indikator meliputi *input*, *process*, *outputs* dan *outcomes*. Penjelasan pada setiap indikator adalah sebagai berikut: Indikator *input* yang memfokuskan pada penilaian sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar untuk melaksanakan kebijakan, yang meliputi sumberdaya manusia, uang atau insfrastruktur pendukung lainnya. Indikator *process* yang memfokuskan pada kebijakan yang ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, yang meliputi efektivitas dan efisiensi dari cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik. Indikator *output* memfokuskan pada hasil atau produk dari proses kebijakan publik. Indikator yang memfokuskan kepada dampak yang diterima oleh masyarkat.

Evaluasi kebijakan bukan hanya digunakan sebagai penilaian dari kebijakan yang sedang atau sudah di implementasikan tetapi juga untuk menilai hal yang terjadi dari keseluruhan proses kebijakan serta berusaha menilai konsekuensi dari kebijakan yang diterapkan dengan melihat dampak-dampak dari kebijakan yang diterapkan serta manfaat dari program-program yang diterapkan.

Dalam evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program UPPKS yang ada di Desa Tambaksari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang dengan menggunakan evaluasi dari Bridgman & davis (Tangkilisan, 2003:28) meliputi *input*, *process*, *output* dan *outcomes*.

Pertama, analisis *input* dalam pelaksanaan program UPPKS terdapat pada sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia serta sumberdaya keuangan. Sumberdaya manusia (SDM) dalam hal ini melihat dari pelaksana kebijakan yang ada di lapangan yaitu PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), dimana PLKB yang ada di Kecamatan Tirtajaya mengalami kekurangan personil yang hanya memiliki 6 (enam) PLKB dengan 11 (sebelas)

desa. Sedikitnya personil membuat PLKB harus memegang lebih dari satu desa, pada koordinator PLKB Desa Tambaksari memegang dua desa, karena tugas PLKB bukan hanya pada kelompok kegiatan UPPKS melainkan banyak program dari BKKBN yang harus dilaksanakan secara bersamaan, sehingga dapat dikatakan dengan sumberdaya manusia (SDM) yang minim mengakibatkan kurang optimalnya kinerja dari PLKB.

Sumberdaya keuangan yang belum dapat menutup semua kegiatan, sehingga harus diatur sedemikian rupa agar anggaran tersebut dapat mencukupi. Dengan anggaran yang minim membuat perolehan ATTG dibatasi untuk setiap tahunnya, dengan pengajuan proposal bantuan ATTG dari kelompok UPPKS kepada DPPKB Kabupaten Karawang kemudian akan ditinjau untuk perolehannya. Minimnya anggaran juga berpengaruh terhadap pemberian penyuluhan kepada kelompok UPPKS yang hanya bisa diberikan kepada perwakilan kelompok UPPKS yang mengikuti penyuluhan, disini akan memunculkan kendala baru seperti tidak adanya penyebaran informasi penyuluhan yang dilakukan oleh DPKKB kepada kelompok UPPKS dan hanya berhenti pada kelompok yang ada dalam penyuluhan tersebut. Minimnya anggaran juga berpengaruh kepada sosialisasi yang tidak dapat dilakukan kepada keseluruhan masyarakat desa dengan mengumpulkan masyarakat yang banyak terutama masyarakat dengan indikator Pra KS dan KS I. Tidak adanya pemberian permodalan kepada kelompok UPPKS berupa permodalan uang, DPPKB hanya memberikan fasilitas berupa ATTG, sehingga banyak masyarakat yang ingin diberdayakan menjadi kelompok UPPKS tetapi kendala utama dalam hal ini adalah modal pertama dalam mendirikan usaha, karena PLKB atau dari DPPKB juga tidak memberikan pelayanan fasilitas akses peminjaman modal kepada pihak-pihak yang lainnya seperti permodalan perbankan dan lainnya, melainkan kelompok UPPKS harus dapat bergerak dengan sendirinya.

Kedua, analisis *process* dalam hal ini merupakan kebijakan yang ditransformasikan kepada pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada program pengembangan ekonomi keluarga, dalam hal ini sebuah kelompok kegiatan UPPKS yang ada di masyarakat perlu adanya koordinasi dengan baik dari segi DPPKB Kabupaten Karawang, Satpel PPKB Kecamatan serta Kepala Desa. Program kegiatan UPPKS merupakan program kegiatan yang berasal dari BKKBN, oleh sebab itu di Kabupaten Karawang menjadi kewenangan dari DPPKB, program-program kegiatan tersebut tentunya akan dilaksanakan oleh perwakilan dari DPPKB di kecamatan yang disebut dengan Satpel PPKB yang diberikan penyuluhan pembinaan dan sebagainya, kemudian program tersebut akan dijalankan oleh masing-masing koordinator PLKB desa yang pembagian kewenangannya dilakukan oleh Satpel PPKB.

Dalam hal ini peran PLKB sangat penting, karena PLKB yang paling dekat dengan masyarakat dan yang paling mengetahui permasalahan serta kondisi lapangan. Oleh sebab itu PLKB mencari potensi dalam suatu desa ataupun kegiatan ibu-ibu desa yang memerlukan adanya pendampingan yang dilakukan. PLKB juga memberikan sosialisasi kepada kepala desa setempat karena Kepala Desa juga sebagai penanggung jawab adanya kelompok kegiatan yang ada di desa tersebut. Pada kondisi kelompok UPPKS yang ada di Desa Tambaksari, kelompok tersebut sudah terbentuk dari awal dan sudah berjalan, kemudian PLKB menawarkan untuk bergabung menjadi kelompok UPPKS dengan melihat bahwa kelompok tersebut memberdayakan ibu-ibu sekitar desa serta kelompok tersebut masih dalam usia produktif dalam penggunaan alat kontrasepsi. Kelompok UPPKS Desa Tambaksari hanya beranggotakan 12 orang dan hanya pada satu produk pemanfaatan pengolahan ikan bandeng.

DPPKB Kabupaten Karawang dan PLKB Desa Tambaksari menginginkan adanya berbagai jenis usaha yang ada di satu kelompok UPPKS. Tetapi dominasi kelompok UPPKS yang ada di Kabupaten Karawang pada satu jenis pengolahan. Sama halnya dengan kelompok UPPKS Desa Tambaksari hanya fokus satu usaha pengolahan ikan bandeng, tidak adanya anggota lainnya yang bergabung dengan mengembangkan usaha lainnya.

Sosialisasi yang dilakukan kepada Kepala Desa pada saat minggon desa yang hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang memiliki akses kepada forum tersebut, informasi yang disampaikan dalam forum tersebut tidak menjamin dapat disebar luaskan kepada masyarakat. Sosialisasi juga diberikan PLKB pada saat melakukan kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), pada saat posyandu serta pada masyarakat yang berada di dusun tempat Kelompok UPPKS terbentuk. Tetapi tidak semua di dusun tersebut mendapatkan sosialisai ataupun penyuluhan tentang adanya program pemberdayaan baik yang dilakukan oleh PLKB maupun dari Kepala Desa.

Ketiga, analisis output memfokuskan penilaian pada hasil dari proses kebijakan publik. Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan program UPPKS di Desa Tambaksari belum dikatakan berperan besar dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Karena memang dari pihak PLKB hanya memberikan pendampingan, pemasaran produk dan tidak berperan secara intensif. DPPKB Kabupaten Karawang juga kurang berperan secara intensif, berperan dalam memberikan penyuluhan, pembekalan, pelatihan pengemasan serta pemasaran yang mana hal-hal tersebut hanya dapat dirasakan oleh beberapa kelompok UPPKS yang mewakili dalam pertemuan kegiatan tersebut, kemudian juga terdapat pemberian fasilitas seperti dalam bantuan mendapatkan label halal dan sejenisnya, serta

pemberian bantuan ATTG yang belum dapat diberikan kepada keseluruhan kelompok UPPKS dan masih bertahap. Kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan terkait dengan program UPPKS terutama kepada pemberian akses permodalan yang sangat penting dan berpengaruh bagi keberlangsungan usaha. Berkembangnya usaha kelompok tersebut, peneliti melihat lebih banyak peran dari kelompoknya sendiri. Peran serta sikap Kepala Desa Tambaksari yang kurang dalam hal pemberdayaan masyarakat, serta kurang mendukung adanya kelompok kegiatan UPPKS di Desa Tambaksari baik dalam hal pemberian fasilitas dan sebagainya.

Keempat, analisis *outcomes* yang terkait dengan dampak yang diterima oleh masyarakat atas kebijakan tersebut. Dalam kegiatan kelompok UPPKS yang ada di Desa Tambaksari belum dapat menyerap banyak masyarakat terutama masyarakat Pra KS maupun KS I, karena memang hanya ada satu kegiatan saja dengan satu jenis usaha dengan hanya 12 anggota yang bergabung, sehingga belum dapat menyerap banyak masyarakat Desa Tambaksari. Tetapi dengan adanya kelompok UPPKS dan adanya anggota yang bergabung mereka mengalami peningkatan kesejahteraan, yang awalnya dominannya pekerjaannya adalah ibu rumah tangga biasa dengan tidak berpenghasilan kemudian setelah bergabung menjadi lebih berpenghasilan dengan membantu perekonomian keluarga, sehingga dapat mengubah kesejahteraan keluarga.

Simpulan

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan suatu program untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu sasaran dari program ini adalah kepada keluarga dengan indikator Pra KS dan KS I. Tujuannya adalah agar terciptanya ketahanan keluarga sehingga diharapkan dapat mempengaruhi sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya dapat meningkat dengan baik. Dengan melihat jumlah anggota dari kelompok UPPKS yang terbentuk, sehingga membuat ketertarikan peneliti untuk melihat evaluasi dari pelaksanaan program UPPKS Desa Tambaksari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten karawang. Evaluasi kebijakan yang melihat dari input, process, output, outcomes. *Input* menunjukkan belum optimalnya kegiatan yang dapat dilihat dari sumberdaya manusia (SDM) dengan melihat jumlah PLKB di Kecamatan Tirtajaya tidak sebanding dengan jumlah desa, serta sumberdaya keuangan yang minim sehingga tidak dapat menutup semua kegiatan. *Process*, dalam kebijakan yang ditransformasikan dalam pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal, karena sosialisasi yang dilakukan belum dapat menyentuh kepada masyarakat. *Output* dari kegiatan program UPPKS hasil

dari kegiatan tersebut belum terlihat secara optimal, kurangnya dukungan yang dilakukan dari pelaksana kebijakan terhadap program UPPKS. *Outcomes* program UPPKS belum sepenuhnya optimal, karena hanya sedikit masyarakat yang terserap pada kelompok UPPKS Desa Tambaksari, tetapi dampak positifnya adalah anggota kelompok tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan keluarga. Perlu adanya penambahan PLKB agar PLKB dapat lebih fokus hanya pada 1 desa yang mereka pegang, sehingga tentunya kinerjanya dapat menjadi lebih baik. Pemberian sarana prasarana bukan hanya pemberian ATTG saja melainkan juga harus disertai dengan modal usaha dengan catatan dengan tetap pada pantauan PLKB, sehingga tidak adanya penyalahgunaan permodalan. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara para pelaksana kebijakan baik dari DPPKB Kabupaten Ka, Satpel PPKB, PLKB serta Pemerintah desa, perlu peningkatan peran masing-masing bagian, terutama peran dari pemerintah desa, desa perlu hadir dalam meningkatkan dukungannya kepada masyarakat yang di tunjukkan dengan tindakan-tindakan nyata.

Referensi

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- BKKBN. (2014). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS*. Bandung: BKKBN Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Presentase Penduduk Miskin Maret 2020*. Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/presentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> (Diakses pada September 2020).
- Creswell, J., W. (2016). *Research Desain Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Data Basis Program KB Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Tirtajaya.
- Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
- Mulya, W., P. (2017). *Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cahaya Kampung Tualang Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Siak Tahun 2016*. JOM FISIP. Vol. 4 (2).
- Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Subarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tangkilisan Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Wahyuningsih, Sri. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus. Madura: UTM PRESS
- Winarno, Budi. (2011). Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS